

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul “Proses Penyelesaian Konflik Bolivia-Brazil Dalam Kasus Nasionalisasi Hidrokarbon (2006-2007)” dalam penulisan skripsi ini dikarenakan penulis menemukan sesuatu yang terbilang baru dan mengejutkan dalam kasus Nasionalisasi Hidrokarbon Bolivia tersebut.

Ada hal menarik yang penulis temukan dalam masalah ini. Berdasarkan sejarah, Bolivia telah lama tidak melakukan nasionalisasi. Bolivia pertama kali menasionalisasi aset negara pada tahun 1937 di sektor minyak. Selanjutnya nasionalisasi minyak ini kembali dilakukan pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 2006, pemerintah Bolivia mengambil kebijakan nasionalisasi aset negara yang telah lama tidak dilakukan, yaitu pada sektor minyak sekaligus gas alam, atau disebut dengan hidrokarbon.

Di samping itu, penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan yang timbul akibat kebijakan nasionalisasi tersebut. Permasalahan tersebut berupa konflik kepentingan antara Bolivia yang bertindak sebagai pelaku nasionalisasi, dengan Brazil yang merupakan investor yang paling keras dalam menolak kebijakan nasionalisasi Bolivia. Selanjutnya, penulis tertarik untuk menganalisa

mengenai proses penyelesaian konflik di antara kedua negara hingga konflik tersebut dapat terselesaikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penulis dalam menyusun skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Menjawab pokok permasalahan berdasarkan landasan teori maupun konsep tentang bagaimana proses penyelesaian konflik antara Bolivia dengan Brazil.
2. Mengetahui seluk beluk hubungan antara Bolivia dengan Brazil dalam masalah hidrokarbon, khususnya dalam kasus nasionalisasi hidrokarbon Bolivia (2006-2007) yang memicu konflik kedua negara.
3. Mengembangkan pembelajaran studi hubungan internasional melalui analisa hubungan antar negara.
4. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Permasalahan

Bolivia dan Brazil merupakan dua negara di kawasan Amerika Selatan yang saling bertetangga dan berbatasan secara langsung satu sama lain. Secara historis, hubungan diplomatik yang terjalin di antara keduanya berjalan secara harmonis, nyaris tanpa adanya suatu konflik.

Bolivia merupakan negara yang mempunyai kekayaan alam berupa sumber energi yang cukup melimpah. Salah satu di antaranya adalah energi hidrokarbon, yaitu berupa minyak bumi dan gas alam (migas). Dengan kekayaan alamnya tersebut, Bolivia menjadi negara pemilik gas hidrokarbon terbesar nomor dua di Amerika Latin setelah Venezuela dengan cadangan sekitar 48,7 triliun meter kubik.¹ Namun Bolivia tidak dapat mengolah hidrokarbonnya sendiri. Secara historis Bolivia sangat bergantung pada perusahaan-perusahaan transnasional untuk mengekstraksi atau mengeksplorasi, salah satunya adalah Petrobras (Petroleo Brasileiro), perusahaan nasional milik Brazil.² Di sisi lain, Brazil merupakan negara yang sangat menggantungkan diri pada hidrokarbon Bolivia untuk pemenuhan perekonomian domestik Brazil.³

Kerjasama tersebut berjalan lancar dan harmonis sejak awal terjalannya kerjasama pada tahun 1996. Namun pada Hari Buruh Sedunia yaitu 1 Mei 2006, Presiden Bolivia pada masa itu, Evo Morales, mengeluarkan dekret No. 28701 yang menyatakan akan dilakukan nasionalisasi seluruh aset migas di Bolivia dan akan diadakan negosiasi ulang seluruh kontrak yang telah ada antara perusahaan-perusahaan energi asing dengan perusahaan migas nasional Bolivia yaitu YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos).⁴

¹ Agus Hamonangan, "Tentara Kontrol Ladang-ladang Migas, Perusahaan Asing Cemas", dalam *Nasionalisasi Morales*, 3 Mei 2006, <http://dir.groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/message/28250?var=1>, diakses 13 November 2010

² *Bolivia: Extractive Industries, Revenue Watch Institute*, <http://www.revenuewatch.org/countries/latin-america/bolivia/extractive-industries>, diakses 21 April 2012

³ Imogene Mcsharry, *Bolivia Economy*, <http://www.centrorisorse.org/bolivia-economy.html>, diakses 21 April 2012

⁴ David Cairns & Antonio Delgado Camprubi, *The Terms of Supreme Decree No.28701 ("The Nationalisation Decree")*, 2006, http://www.bcremades.com/esp/archivos/david/Supreme_Decree%20No_28701.pdf, diakses 9 Desember 2010

minyak kembali dilakukan pada tahun 1969 oleh pemerintahan Alfredo Ovando Candia dengan menasionalisasi aset dari perusahaan Gulf Oil.⁷

Nasionalisasi bukanlah suatu trend di Bolivia meskipun mayoritas rakyat menginginkan nasionalisasi atas sumber-sumber kekayaan negara sejak sekian lama. Sejak awal tahun 1990-an, aset-aset negara cenderung diprivatisasi oleh pemerintah, seperti kebijakan privatisasi perusahaan nasional oleh presiden Hugo Banzer dan program kapitalisasi yang dijalankan oleh presiden Gonzalo Sanchez de Lozada.⁸ Selanjutnya, pada tahun 2006, pemerintah Bolivia kembali mengambil kebijakan nasionalisasi aset negara, yaitu minyak dan gas alam (hidrokarbon) di bawah kepemimpinan Evo Morales.

Dengan dilakukannya nasionalisasi hidrokarbon tersebut, maka kemudian timbul kekhawatiran di pihak perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di sektor hidrokarbon mengenai masa depan kelangsungan hubungan kerjasama mereka, apalagi belum ada kejelasan mengenai jenis nasionalisasi apa yang dilakukan oleh Bolivia. Kekhawatiran tersebut pun memicu ketegangan antara Bolivia dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut, khususnya Petrobras, perusahaan nasional Brazil yang merupakan konsumen gas utama Bolivia.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka secara garis besar pokok permasalahan yang ingin dijawab adalah:

⁷ *Timeline Bolivia*, <http://timelines.ws/countries/BOLIVIA.HTML>, diakses 8 Desember 2010

⁸ "Country Profile: Bolivia", dalam *Library of Congress*, Federal Research Division, Januari 2006, hal. 6, <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Bolivia.pdf>, diakses 14 November 2010

“Bagaimanakah proses penyelesaian konflik Bolivia-Brazil dalam kasus Nasionalisasi Hidrokarbon (2006-2007)?”

E. Kerangka Pemikiran / Landasan Teori

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, maka diperlukan adanya suatu kerangka pemikiran yang berupa teori maupun konsep. Pada penulisan skripsi ini, digunakan Teori Resolusi Konflik menurut John Burton, Konsep Negosiasi menurut Jack Sawyer dan Harold Guetzkow, dan Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument.

1. Teori Resolusi Konflik Menurut John Burton

Salah satu cara yang biasa diambil untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan internasional yaitu resolusi konflik. Secara umum, resolusi konflik merupakan suatu upaya penyelesaian konflik. Menurut John Burton, resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi berbeda dengan sekedar manajemen atau settlement, mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat, merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah.⁹

Resolusi konflik merupakan istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang berakar akan dapat diperhatikan dan diselesaikan. Hal ini mengimplikasikan bahwa perilaku konflik tidak lagi penuh dengan kekerasan, sikap konflik tidak lagi membahayakan.¹⁰ Konflik tidak lagi identik dengan senjata dan perang, namun dapat berupa penentangan yang bersifat korektif atas

⁹ John Burton, *Conflict: Resolution and Prevention* (London: McMillan Press, 1991)

¹⁰ B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 341

suatu kebijakan tertentu. Namun jika tidak menemukan resolusi konflik yang sesuai, maka kemungkinan dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Burton selanjutnya mengungkapkan bahwa resolusi konflik adalah, dalam jangka panjang, suatu proses perubahan politik, sosial dan ekonomi. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.¹¹

Resolusi konflik menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka. Resolusi konflik juga berupaya menciptakan suatu mekanisme penyelesaian konflik secara umum dalam tiap-tiap tahap eskalasi konflik. Pada intinya, resolusi konflik mengutamakan prinsip-prinsip bahwa konflik tidak dapat dipandang sebagai suatu fenomena politik-militeristik, namun juga harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial, dan resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan.

Resolusi konflik yang baik harus melibatkan usaha bersama pihak-pihak yang berkonflik untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak dapat saling berkomunikasi secara terbuka. Mereka saling bertukar informasi mengenai kepentingan dan prioritas masing-masing, bersama-sama berusaha mengidentifikasi apa sesungguhnya isu yang menjadi penyebab

¹¹ John Burton, *op. cit.*, hal. 71

masalah, serta berusaha mencari dan mengevaluasi solusi-solusi yang dapat menguntungkan mereka sesuai dengan kepentingan masing-masing.

2. Konsep Negosiasi Menurut Jack Sawyer dan Harold Guetzkow

Pendekatan yang lazim terhadap penyelesaian konflik pada umumnya berdasarkan negosiasi. Negosiasi secara umum merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang berkonflik berusaha untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri. Negosiasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan jalan komunikasi langsung tanpa pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator dalam upaya untuk meraih kesepakatan yang dapat diterima satu sama lain.

Jack Sawyer dan Harold Guetzkow, memberikan penjelasan mengenai definisi negosiasi sebagai salah satu bentuk diplomasi yang tujuan utamanya menjembatani dan mempertemukan kepentingan negara-negara yang saling bertentangan.¹²

Sebelum melakukan negosiasi, diperlukan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut menurut G.A. Craig dan A.L. George yaitu harus ada dua elemen di dalam negosiasi, harus ada kepentingan dan isu yang sama dari konflik. Tanpa adanya kepentingan tidak akan ada yang dinegosiasikan, dan tanpa isu yang sama juga tidak akan ada yang dinegosiasikan.¹³

Ada beberapa tahapan dalam negosiasi. Namun, sebenarnya pelaksanaan negosiasi tidak mempunyai aturan baku. Tahapan-tahapan negosiasi bergantung

¹² Jack Sawyer & Harold Guetzkow, "Bargaining and Negotiation in International Relations", dalam *International Behavior: A Social Psychological Analysis* (New York: Holt Rinehart and Winston, 1965), hal. 466

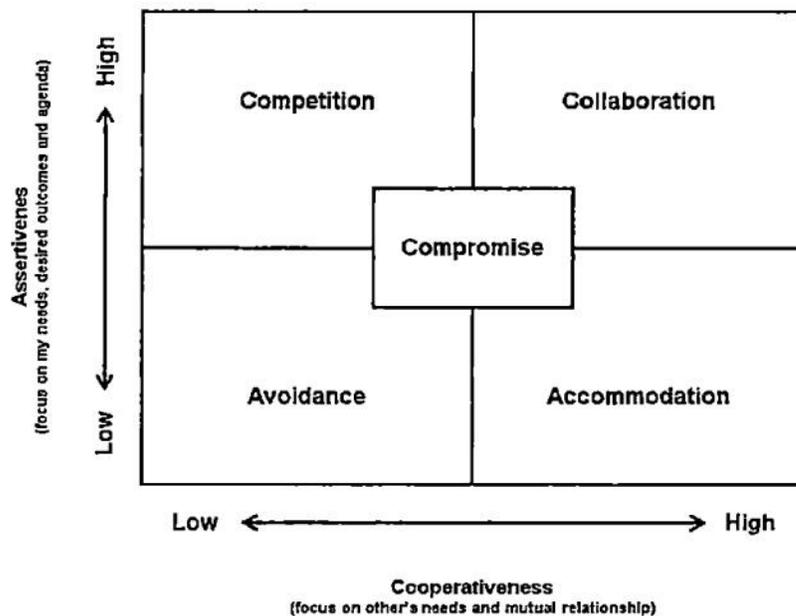
¹³ Gordon A. Craig & Alexander L. George, *Introduction To International Politic* (New York: Prentice Hall, 1980)

pada permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini hanya berjalan dengan baik apabila pihak-pihak yang berkonflik setuju melakukan negosiasi dan mempunyai sesuatu yang nyata yang dapat ditawarkan atau dinegosiasikan oleh mereka.

3. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument

Menurut Thomas dan Kilmann ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai strategi penyelesaian konflik yaitu *competition*, *collaboration*, *compromise*, *avoidance*, dan *accommodation*.¹⁴ Masing-masing pendekatan tersebut dapat digunakan secara efektif oleh pihak-pihak terkait pada situasi yang tepat. Secara skematis, model penyelesaian konflik tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument



Sumber: Kenneth W. Thomas & Ralph H. Kilmann. (1974). *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument*.

¹⁴ Kenneth W. Thomas & Ralph H. Kilmann. *Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument* (New York: Xicom, Inc., 1974)

Keterangan:

1. Assertiveness

Tingkat ketegasan dalam memperjuangkan kepentingan pribadi dalam suatu konflik.

2. Cooperativeness

Tingkatan hubungan kerjasama dengan pihak lawan dalam suatu konflik.

3. Competition

Kompetisi atau persaingan, merupakan pendekatan terhadap konflik yang mempunyai ciri menang-kalah, sehingga disebut juga *win-lose approach*.

Salah satu pihak memperjuangkan kepentingannya dengan mengorbankan pihak lain. Sedangkan tujuannya mendapatkan yang diperjuangkan dan mengalahkan pihak lain.

4. Collaboration

Kolaborasi, menciptakan situasi menang-menang dengan saling bekerja sama. Kedua belah pihak bekerjasama dan mencari pemecahan konflik yang dapat memuaskan kepentingan kedua belah pihak. Pengelolaan konflik menggunakan teknik kerja sama merupakan pendekatan menang-menang (*win-win approach*). Tujuan dari pendekatan ini yaitu masing-masing mendapatkan apa yang diinginkan.

5. Compromise

Kompromi, dapat dilakukan jika kedua belah pihak yang terlibat konflik merasa bahwa hubungan baik menjadi yang utama. Teknik penyelesaian konflik ini mengharuskan kedua belah pihak saling memberi kelonggaran

Apapun bentuk pendekatan yang akan dipilih oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik, menurut K.J. Hosti, pada akhirnya akan selalu menjadi hasil akhir dari proses bargaining atau tawar-menawar, seperti dengan melakukan *commitment* atau janji dan mengeluarkan ancaman, antara dua pemerintahan atau lebih.¹⁵

Dalam kasus Bolivia dan Brazil, tampak bahwa permasalahan yang ada timbul karena keduanya sama-sama menginginkan bagian keuntungan yang lebih besar dari sektor gas karbon yang ada di Bolivia. Oleh karena itu, perlu adanya suatu resolusi konflik yang tepat guna mendapatkan penyelesaian masalah, sehingga konflik kepentingan tersebut dapat diatasi secara maksimal. Secara umum, tujuannya adalah untuk memperoleh kepentingan yang diinginkan oleh masing-masing pihak.

Ditinjau dari pendekatan-pendekatan di atas, penyelesaian konflik dalam kasus Bolivia dan Brazil ini akan digunakan pendekatan negosiasi yang dalam prosesnya digunakan pendekatan *bargaining* dan pendekatan *competition*. Berdasarkan pendekatan tersebut, Bolivia cenderung memiliki keuntungan dengan menjadi pihak pertama yang mengeluarkan *opening bid* dengan Dekrit Nasionalisasinya.

Faktor waktu menjadi salah satu poin penting dalam konflik ini. Hal ini ditunjukkan oleh bagaimana periode tenggang terjadinya negosiasi antara Bolivia dan Brazil dapat menghambat proses produksi gas Bolivia yang tentu saja merugikan Bolivia dan Brazil. Dalam proses negosiasi ini tampak pula suatu

¹⁵ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis*, ed. 7, (New Jersey: Prentice Hall, 1994) hal. 445.

dinamika tawar-menawar kepentingan, dimana Bolivia tampak menunjukkan komitmennya yang kuat untuk mempertahankan tawaran awalnya. Di lain pihak Brazil yang semula bertindak lebih fleksibel mulai ikut mengeraskan posisinya, sambil mengeluarkan ancaman.

Dalam proses ini, serangkaian ancaman, janji dan komitmen tampak secara dinamis akan terlihat silih berganti dikeluarkan oleh pihak Bolivia dan Brazil. Sampai pada akhirnya, lamanya waktu negosiasi beserta rangkaian ancaman janji dan komitmen tersebut telah mendorong kedua belah pihak pada sebuah kesepakatan akhir.

Selanjutnya hasil akhir yang dicapai oleh Bolivia dan Brazil ini dapat dilihat sebagai suatu bagian dari strategi guna mengamankan kepentingan lain dan memaksimalkan keuntungan yang dapat mereka terima dari bagian tersebut, yang pastinya tidak dapat tercapai jika kesepakatan gagal dicapai dan kemudian mengakibatkan meluasnya konflik menjadi konflik terbuka.

Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas, maka studi ini selanjutnya dimaksudkan untuk menganalisa langkah-langkah negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Langkah-langkah negosiasi tersebut meliputi:

1. Diawali oleh sikap pemerintah Brazil dengan dukungannya terhadap nasionalisasi Bolivia dan menyatakan sikap tegas dalam melindungi kepentingannya dalam negosiasi termasuk dalam kaitannya dengan jaminan suplai gas.

2. Morales Presiden Bolivia selanjutnya meyakinkan Lula Presiden Brazil bahwa Bolivia menjamin suplai gas alam ke Brazil
3. Pada 4 Mei 2006 di Puerto Iguazu, Argentina, Lula da Silva (Brazil) memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Hugo Chavez (Venezuela), Nestor Kirchner (Argentina), dan Evo Morales (Bolivia) guna membahas dampak kebijakan nasionalisasi Bolivia.
4. Pada 10 Mei 2006 di La Paz, Bolivia, diadakan sebuah pertemuan darurat antara Silas Rondeau (Menteri Pertambangan dan Energi Brazil), Andres Soliz Rada (Menteri Hidrokarbon Bolivia), Jose Sergio Gabrielli de Azevedo (Presiden Petrobras), dan Jorge Alvarado (Presiden YPFB), guna mendiskusikan isu-isu yang ada dalam Supreme Decree No. 28701.
5. Pada 11 Mei 2006, dalam Konferensi Wina, Evo Morales menuduh keberadaan Petrobras di Bolivia adalah illegal dan menginginkan kenaikan harga tinggi.
6. Petrobras perusahaan Brazil pun melakukan pembelaan dalam *press release* resmi.
7. Pada 12 Mei 2006, masih dalam Konferensi Wina, Morales mengancam bahwa Petrobras tidak akan diberi kompensasi.
8. Pada 13 Mei, di sela-sela Konferensi Wina, pemerintah Brazil bertemu dengan Morales guna mengatasi konflik hidrokarbon yang semakin tegang. Menanggapi ancaman Morales mengenai tidak adanya kompensasi, Celso Amorim Menlu Brasil balik mengancam akan menarik duta besar Brazil dari La Paz, Bolivia.

9. Pada periode Juni-Agustus 2006, pihak Bolivia dan Brazil melakukan empat kali negosiasi intensif mengenai kenaikan tarif ekspor gas Bolivia ke Brazil. Negosiasi ini diadakan secara berurutan mulai dari La Paz (Bolivia), Santa Cruz de La Sierra (Bolivia), dan dua kali dilangsungkan di Rio de Janeiro (Brazil).
10. Pada 12 September 2006, Andres Soliz (Menteri Hidrokarbon Bolivia), mengeluarkan resolusi hidrokarbon yang disusul dengan penolakan oleh pemerintah Brazil dan Petrobras.
11. Pada kesempatan selanjutnya, Menteri Hidrokarbon Bolivia yang baru, Carlos Villegas, pengganti Andres Soliz yang mengundurkan diri, memberlakukan peraturan baru yang memberi isyarat positif bagi keberlangsungan negosiasi.
12. Presiden Lula pun menyampaikan apresiasinya berkaitan dengan pergantian kabinet Bolivia.
13. Pada 21 September 2006, Lula da Silva meberi peringatan kepada Bolivia betapa pentingnya peran Brazil bagi Bolivia, menyusul peringatan Villegas sebelumnya berkaitan dengan *deadline* renegotiasi kontrak.
14. Negosiasi harga gas kembali dilangsungkan pada 29 September 2006 di Santa Cruz, Bolivia oleh Petrobras dan YPFB.
15. Pada 20 Oktober 2006, Villegas mengingatkan kembali kepada Petrobras untuk segera menandatangani kontrak baru.
16. Pada 23 dan 27 Oktober, pihak Bolivia dan Brazil kembali bernegosiasi berkaitan dengan renegotiasi kontrak.

17. Akhirnya pada 28 Oktober 2006, Pemerintah Bolivia dan YPFB berhasil menyelesaikan kontrak baru dengan Petrobras.
18. Pada 14 Februari 2007, di Brazilia, Presiden Brasil dan Presiden Bolivia sepakat menandatangani perjanjian mengenai harga ekspor gas alam Bolivia yang baru, setelah melalui negosiasi yang panjang.
19. *Agreement* antara Petrobras dan YPFB pada akhirnya baru berhasil diratifikasi pada Mei 2007 setelah beberapa bulan perbaikan kesalahan administrasi. Konflik hidrokarbon pun selesai sepenuhnya sehingga konflik terbuka antara Bolivia dan YPFB berhadapan dengan Brazil dan Petrobras pun dapat dihindari.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang baik sudah semestinya menggunakan metode penelitian yang baik pula. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah negosiasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara Bolivia dan Brazil dalam kasus Nasionalisasi Hidrokarbon Bolivia (2006-2007).

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan menganalisis data-data sekunder baik dari buku, majalah, jurnal, artikel, surat kabar, internet maupun bentuk-bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan batasan mengenai ruang lingkup penelitian agar penulis tidak

menyimpang dari tema atau tujuan yang telah direncanakan. Waktu penelitian dimulai dari Mei 2006 ketika terjadi aksi nasionalisasi hidrokarbon oleh Bolivia, yang merupakan penyebab dari konflik hidrokarbon, dan diakhiri pada Mei 2007 ketika kontrak kerjasama Bolivia dan Brazil berhasil diratifikasi, yang merupakan penanda berakhirnya proses negosiasi antara Bolivia dan Brazil dalam konflik hidrokarbon. Fokus utama yang akan dikaji adalah bagaimana proses penyelesaian konflik yang terjadi antara Bolivia dengan Brazil dalam kasus nasionalisasi gas hidrokarbon Bolivia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima Bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai alasan pemilihan judul, tujuan dilakukannya penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran / landasan teori, metode penelitian yang digunakan, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Di dalamnya dibahas mengenai hubungan bilateral Bolivia dan Brazil, mulai dari hubungan secara umum, hubungan di bidang ekonomi, hubungan di bidang politik, dan hubungan di bidang energi, khususnya energi hidrokarbon.

Bab III. Di dalam Bab ini dibahas mengenai konflik yang terjadi antara Bolivia dan Brazil dalam kasus Nasionalisasi Hidrokarbon Bolivia (2006-2007), meliputi faktor-faktor penyebab konflik dan akibat dari konflik tersebut.

Bab IV. Pembahasan masalah. Bab ini membahas mengenai proses penyelesaian konflik antara Bolivia dan Brazil dalam kasus Nasionalisasi Hidrokarbon Bolivia (2006-2007), beserta hasil-hasil yang disepakati oleh kedua negara.

Bab V. Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan masalah.